



## **EFEKTIVITAS PENGANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Muhammad Navinza Nur Rizky<sup>1</sup>, Achmad Al Bushtomi<sup>2</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>4</sup>**

[muhammadnavinza@gmail.com](mailto:muhammadnavinza@gmail.com)<sup>1</sup>, [bustomialahmad@gmail.com](mailto:bustomialahmad@gmail.com)<sup>2</sup>, [evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id)<sup>3</sup>,  
[meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Negeri Surabaya**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penganggaran belanja daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi fungsi pengawasan oleh DPRD. Data APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 menunjukkan kapasitas fiskal yang besar, namun tingkat serapan anggaran yang belum optimal mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi anggaran. Dengan demikian, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

**Kata Kunci:** Penganggaran Daerah, Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Sidoarjo.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of regional expenditure budgeting in improving the quality of public services in Sidoarjo Regency. The research employs a qualitative approach using a literature review method through the examination of scientific journals, reference books, and regulations related to regional financial management. The results indicate that budgeting effectiveness is influenced by transparency, community participation, and the optimization of the oversight function by the Regional House of Representatives (DPRD). Data from the Sidoarjo Regency Regional Budget (APBD) in 2025 shows a large fiscal capacity; however, the level of budget absorption remains suboptimal, indicating issues in budget implementation. Therefore, it is necessary to enhance transparency, strengthen community participation, and optimize oversight functions to achieve effective budget management that is oriented toward improving public services.*

**Keywords:** *Regional Budgeting, Public Services, Transparency, Community Participation, Sidoarjo.*

## **PENDAHULUAN**

Penganggaran belanja daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Di Kabupaten Sidoarjo, pengelolaan anggaran menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. APBD tahun 2025 ditetapkan sebesar sekitar Rp5,947 triliun dengan pendapatan daerah sebesar Rp5,428 triliun (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2024). Selain itu, melalui perubahan APBD, belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp6,066 triliun (DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2024). Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, efektivitas penganggaran masih menghadapi tantangan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 61,16% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang berpotensi menghambat peningkatan pelayanan publik.

Efektivitas penganggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (Sopannah, 2003). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penganggaran belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

## METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memahami hubungan antara penganggaran daerah, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran belanja daerah di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya sudah didukung oleh kapasitas fiskal yang cukup besar. APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp5,947 triliun, serta perubahan anggaran menjadi sekitar Rp6,066 triliun, memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Tabel 1 Ringkasan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Komponen	Nilai (Rp)
Total APBD 2025	5.947.000.000.000
Pendapatan Daerah	5.428.986.275.802
Pembiayaan Daerah	519.000.000.000

Sumber: Data pengesahan APBD Kabupaten Sidoarjo 2025

Namun, dari sisi implementasi, efektivitas penganggaran masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 61,16% hingga triwulan III tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Akibatnya, beberapa program pelayanan publik berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Daerah (s.d. September 2025)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pendapatan Daerah	5.428.986.275.802	4.075.478.478.925	75,07%
PAD	2.673.813.507.802	2.131.013.104.961	79,70%
Pajak Daerah	1.696.451.167.743	1.341.285.841.797	79,06%

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Retribusi Daerah	910.860.898.805	684.459.830.954	75,14%
Transfer Pusat & Daerah	2.755.172.768.000	1.944.465.373.964	70,58%

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Sidoarjo 2025 (Pemkab)*

Dalam pembahasan lebih lanjut, efektivitas penganggaran tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh bagaimana proses pengelolaannya dilakukan. Transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Ketika informasi anggaran terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penganggaran. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan sebagian kebijakan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Padahal, partisipasi publik dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran.

Dari sisi kelembagaan, DPRD memiliki fungsi strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan ini bertujuan agar anggaran yang telah disetujui dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi kendala, terutama terkait kapasitas teknis dan keterbatasan dalam melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, permasalahan utama yang ditemukan dalam penganggaran belanja daerah di Kabupaten Sidoarjo terletak pada aspek implementasi, bukan pada ketersediaan anggaran. Hambatan seperti keterlambatan pelaksanaan program, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem pengawasan menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan anggaran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan fiskal yang baik, efektivitas penganggaran dalam meningkatkan pelayanan publik masih memerlukan perbaikan. Peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran DPRD menjadi langkah penting yang perlu dilakukan agar pengelolaan anggaran daerah dapat lebih efektif dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penganggaran belanja daerah di Kabupaten Sidoarjo sudah didukung oleh kemampuan fiskal yang cukup besar, terlihat dari APBD yang tinggi pada tahun 2025. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan pelayanan publik masih belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan DPRD masih perlu diperkuat agar pengelolaan anggaran lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan pada besarnya anggaran, tetapi pada pelaksanaan dan tata kelola anggaran yang belum berjalan secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2025). Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2025. BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Bappenas. (2022). Perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bastian, I. (2019). Sistem akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- DPRD Kabupaten Sidoarjo. (2024). Dokumen persetujuan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025. DPRD Kabupaten Sidoarjo.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBD dan kinerja keuangan daerah. Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2016). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2017). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- OECD. (2019). Budgeting practices and procedures in OECD countries. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2024). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform: A comparative analysis (2nd ed.). Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Sopannah. (2003). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Governance and public sector reform. UNDP.
- World Bank. (2020). Public expenditure review. World Bank.